

ABSTRAK

Peningkatan peranan tanah sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan bisnis juga diikuti pula dengan kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum di bidang pertanahan. pada Hak Guna Bangunan Tanah Pengelola ini terjadi sejak didaftarkannya pada kantor Pertanahan, hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah Hak Pengelolaan dengan keputusan pemberian hak yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan atas usul dari pemegang Hak Pengelolaan. Hak Guna Bangunan Bekas Tanah Negara ini terjadi melalui keputusan pemberian hak yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional menurut Tata cara terjadinya HGB ini diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 48 Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif normatif, artinya dengan menguraikan atau menjelaskan norma-norma atau aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hukum Positif), dengan memperhatikan kondisi-kondisi atau keadaan nyata yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. hasil penelitian yang mula-mula dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap semua, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder peraturan yang berkaitan langsung dengan permasalahan HGB yang kemudian data yang diperoleh diverifikasi dan ditarik kesimpulan. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan dalam prakteknya masih banyak masyarakat akan ketidaktahuan alur dan cara untuk memperpanjang / memperbaharui / meningkatkan HGB. Hal ini karena disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga masyarakat enggan untuk melakukan pergantian karena mengeluarkan biaya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Agar mengetahui proses penyelesaian permohonan Pemberian Hak Milik Atas Tanah terhadap Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan yang menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan.

Kata Kunci : Hak Guna Bangunan (HGB), Permohonan peningkatan Hak Milik (SHM)

ABSTRACT

The increasing role of land as a place to live or for business activities is also followed by the need for support in the form of legal certainty in the land sector. the Building Use Rights of Management Land occur since the registration at the Land Office, the building use rights are granted on the Land Management Rights with a decision granting the rights issued by the Minister or an appointed official based on a recommendation from the Management Right holder. The building use rights for the former state lands occurred through a decision to grant rights issued by the National Land Agency according to the procedure for the occurrence of this HGB regulated in Article 32 to Article 48 of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN No. 9 of 1999 concerning Procedures for Granting and Canceling State Land Rights and Management Rights. The research method used in this thesis is a normative qualitative research method, meaning that by describing or explaining the norms or rules in applicable laws and regulations (Positive Law), taking into account real conditions or circumstances that are happening in life public. research results that were initially collected by conducting an inventory of all, both from primary data sources and secondary regulatory data sources that are directly related to HGB issues, then the data obtained is verified and conclusions are drawn. So that it can be concluded that in practice there are still many people who do not know the flow and ways to extend / renew / increase HGB. This is because it is caused by economic factors so that people are reluctant to make changes because they incur costs. This is what makes the writer interested in doing this research. In order to know the process of completing the application for the Granting of Land Ownership Rights to State Land of the Former Building Use Rights which is the authority of the Head of the Land Office.

Keywords: Building Use Rights (HGB), Application for an increase in Property Rights (SHM)